



Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN)

SIARAN PERS

Catatan Tahun 2022

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

“MELAWAN PENUNDUKAN”

Jakarta, 13/1/2022 – Sepanjang tahun 2022 kita diperhadapkan dengan berbagai fenomena politik yang mendistorsi semangat demokrasi, mulai dari upaya menyalahi konstitusi untuk masa jabatan presiden tiga periode, penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan Presiden, utak-atik regulasi tanpa melalui prosedur yang demokratis, pelanggaran HAM dan kriminalisasi yang semakin massif hingga lahirnya berbagai regulasi yang kontradiktif dengan kepentingan Masyarakat Adat.

Lahirnya UU CILAKA yang dilakukan secara diam-diam dan tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil. Isinya bahkan mendaur ulang pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Tak hanya itu, berbagai produk hukum lainnya seperti revisi UU Minerba, UU IKN, pengesahan UU KUHP, Perppu Cipta Kerja, Perpres Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang dilahirkan justru mengancam hajat hidup Masyarakat Adat. Sebaliknya, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang menjadi harapan bagi seluruh Masyarakat Adat di Indonesia justru jalan ditempat akibat adanya penolakan dari fraksi Golkar dan sebab-sebab politis lainnya.

Alih-alih memberikan perlindungan hak Masyarakat Adat atas tanah dan sumber alam, berbagai hukum dan kebijakan di sektor pertanahan yang diproduksi oleh pemerintah justru dijadikan alat untuk mereduksi hak-hak kolektif/komunal yang dimiliki oleh komunitas Masyarakat Adat. Sebagai contoh dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kantor-kantor BPN lebih mengarahkan warga untuk mendaftarkan tanahnya secara individu untuk mengejar target jumlah bidang tanah yang disertifikatkan.

PTSL merupakan proyek kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dan Bank Dunia sebesar USD 200 juta atau Rp 2,9 triliun bagi program reforma agraria untuk menata Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam bentuk pinjaman (utang). Demikian juga halnya proyek infrastruktur khususnya pembangunan bendungan yang dibiayai Asian Development Bank (ADB). Fakta lapangan menunjukkan proyek-proyek bendungan di Indonesia yang berdampak bagi Masyarakat Adat, tidak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak sebagaimana yang diatur dalam kerangka pengaman sosial (*social safeguard*) terkait Masyarakat Adat.

“Situasi diatas menunjukkan bahwa negara kita saat ini lebih berorientasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi mengabaikan hak asasi Masyarakat Adat nusantara yang merupakan pilar historis dan faktual keberadaan serta keberlangsungan negara Indonesia”, ujar Rukka Sombolinggi (Sekjend AMAN).

Sementara itu, hingga oktober 2022 total produk hukum daerah yang telah berhasil ditetapkan mencapai 161 Produk Hukum Daerah. Penetapan hutan adat hingga saat baru mencapai

PB AMAN

Jl Tebet Timur Dalam Raya No. 11A, Jakarta Selatan 12820, Indonesia.

Telpon +6221 - 8297954 Fax:+6221 - 83706282

Email: rumahaman@cbn.net.id - Website: <http://www.aman.or.id> - Milis: adatlist@yahooogroups.com



Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN)

148.488 hektar. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan 12,4 juta hektar peta wilayah adat yang telah diserahkan ke Pemerintah. Bahkan 2.400 hektar hak Masyarakat Adat atas hutan adat yang telah ditegaskan dalam Putusan MK.35 Tahun 2012, justru dirampas dengan menggunakan program perhutanan social (HD, HKM, HTR, dan Kemitraan).

“AMAN akan terus membangun dan memperkuat konsolidasi gerakan masyarakat sipil untuk memastikan solidaritas gerakan Masyarakat Adat, Petani, Nelayan dan Buruh bahu-bahu menghadapi rezim pemerintahan yang refresif hari ini. Masyarakat Adat akan terus memperkuat diri menghadapi perampasan hak-hak tradisionalnya yang telah diakui di dalam konstitusi”, Pungkas Rukka.

--- s e l e s a i ---

- Keterangan tentang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dapat dilihat di www.aman.or.id
- **Kontak Media**
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Erasmus Cahyadi Terre (Deputi II Sekjend AMAN Bidang Politik)

HP: 0812-8428-0644

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

PB AMAN

Jl Tebet Timur Dalam Raya No. 11A, Jakarta Selatan 12820, Indonesia.

Telpon +6221 - 8297954 Fax:+6221 - 83706282

Email: rumahaman@cbn.net.id - Website: <http://www.aman.or.id> - Milis: adatlist@yahoogroups.com